

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara republik yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau sebuah sistem yang mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dimana tujuan implementasi otonomi daerah adalah salah satu bentuk pendekatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, menimbulkan inovasi sehingga antar daerah dapat menciptakan persaingan yang sehat dan tentunya untuk menjadi alat kontrol atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019).

Pemerintah desa juga diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Mamuaya dkk, 2017).

Menurut Labi (2019), Anggaran pemerintah merupakan instrument kebijakan yang tentunya harus memuat kinerja, karena konsekuensi dari adanya pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah sangat dituntut untuk siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber daya dan sumber dana yang ada dengan tujuan agar tetap melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, pemerintah daerah juga sangat dituntut agar mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah desa, adanya APBDes yang digunakan untuk melakukan pembangunan terhadap desa dan pelayanan terhadap masyarakat dituntut untuk transparan dan akuntabilitas dalam penggunaannya agar visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di awal dapat tercapai.

Menurut Pasaribu (2019), Suatu daerah dapat dikatakan mampu dalam menjalankan otonomi daerah, diukur melalui pengukuran kinerja keuangan daerah tersebut. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dengan tujuan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal. Menurut Lestari dkk (2020), kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber dana tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lestari dkk (2020), kinerja keuangan suatu desa dapat diketahui melalui analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu desa dengan tujuan mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengendalikan keuangan desanya secara optimal atau tidak. Analisis kinerja keuangan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa yaitu melalui analisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah desa.

Berikut data Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Selat Tahun 2017-2020

URAIAN	Tahun			
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Hasil Usaha	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Transfer	Rp 1.720.015.018,00	Rp 1.904.869.857,03	Rp 2.018.188.059,00	Rp 1.787.694.550,00
Dana Desa	Rp 813.611.677,00	Rp 825.109.113,00	Rp 939.046.000,00	Rp 988.228.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 21.393.738,00	Rp 25.335.472,00	Rp 20.797.059,00	Rp 0,00
Alokasi Dana desa	Rp 825.009.603,00	Rp 994.425.272,03	Rp 998.345.000,00	Rp 739.466.550,00
Bantuan Provinsi	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 2.558.139,52	Rp 958.552,02
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.720.015.018,00	Rp 1.904.869.857,03	Rp 2.020.746.198,52	Rp 1.788.653.102,02
BELANJA				
Belanja Pegawai	Rp. 253.248.000,00		Rp. 382.631.172,00	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 637.410.500,00		Rp 729.733.273,00	
Belanja Modal	Rp 786.923.000,00		Rp 786.527.600,00	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	Rp 692.899.111,30	Rp	Rp 514.199.352,50
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	Rp 884.309.000,00	Rp	Rp 766.340.750,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	Rp 359.771.000,00	Rp	Rp 92.129.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				Rp 591.705.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 1.677.581.500,00	Rp 1.946.979.111,30	Rp 1.898.892.045,00	Rp 1.974.374.102,50
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 42.433.518,00	Rp (42.109.254,27)	Rp 121.854.153,52	Rp (185.721.000,48)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00	Rp 274.627.451,00	Rp 170.518.196,73	Rp 292.372.350,25
SILPA	Rp -	Rp 274.627.451,00	Rp 170.518.196,73	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp 62.000.000	Rp 0,00	Rp 0,00
Penyertaan Modal Desa	Rp 0,00	Rp 62.000.000	Rp 0,00	Rp -
JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp 0,00	Rp 212.627.415,00	Rp 170.518.196,73	Rp 292.372.350,25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2017-2020

Desa Selat memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Desa Selat memiliki lahan pertanian yang luas, lahan pekarangan yang subur sehingga Desa Selat ini terkenal dengan hasil perkebunan buah durian yang biasa disebut Durian Selat. Hampir setengah dari Desa Selat di tanami oleh pohon durian. Selain itu, Desa Selat juga merupakan wilayah yang di aliri oleh aliran anak

Sungai Batanghari sehingga berpotensi juga untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan dan bahan material seperti kerikil dan pasir. Potensi-potensi tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam peningkatan perekonomian Desa.

Dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Desa Selat diatas menunjukkan bahwa ternyata pada tahun 2017 pendapatan asli desa (PADes) Pemerintah Desa Selat masih belum terealisasi dengan baik karena ditunjukkan tidak adanya penerimaan dari sisi Penerimaan Asli Desa (PADes) , begitu juga pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Pemerintah Desa Selat tidak ada penerimaan dari sisi Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini berarti Pemerintah Desa Selat selama 4 tahun belum dapat mengoptimalkan atau menggali potensi daerahnya sendiri dalam peningkatan penerimaan dari sisi Pendapatan Asli Desa (PADes) . Dengan belum adanya realisasi anggaran yang optimal dari sisi penerimaan PADes Selat diatas, menunjukkan bahwa kondisi tersebut mempengaruhi kinerja.

Jika dilihat dari sisi jumlah pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari tahun 2017 hingga tahun 2019 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020. Dengan adanya peningkatan pendapatan Desa Selat berarti ketersediaan dana Pemerintah Desa Selat dalam melaksanakan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terpenuhi. Kemudian dilihat dari sisi belanjanya bahwa belanja pemerintah Desa Selat di setiap tahunnya mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2018 dan tahun 2020 ditunjukkan dengan terjadinya defisit anggaran. Peningkatan pendapatan dan belanja ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Selat telah banyak melaksanakan kegiatan yang menjadi visi, misi, dan juga tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Gambaran kinerja dari suatu Pemerintah Desa adalah dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya visi, misi, tujuan serta sasaran pemerintah desa tersebut . Kegiatan atau program yang telah direalisasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa Selat menunjukkan suatu ketercapaian apabila dilihat dengan sebuah ukuran. Yaitu pengukuran kinerja keuangan yang merupakan sebuah alat untuk melakukan penilaian kegiatan agar dapat mengetahui tingkat efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan serta sejauh mana sebuah organisasi telah mencapai kemajuannya. Oleh karena itu Pemerintah Desa Selat sebagai konsekuensi bentuk pelaksanaan otonomi daerah dituntut untuk melakukan perencanaan program anggaran yang baik terhadap ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat serta tentunya harus didukung dengan kualitas kinerja pemerintahnya yang baik pula. Karena yang pada tujuan akhirnya adalah agar terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien serta pemerintah desa yang menerapkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari.

Menurut Mahmudi (2019), analisis kinerja keuangan pemerintah bisa diukur dengan menganalisis rasio keuangannya yaitu terdiri dari:

Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang dapat mengukur tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai dengan yang ditargetkan, dan Rasio Efisiensi Belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rohman dkk (2020). Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat rasio kemandirian sangat kurang, rasio efisiensinya sudah baik atau efisien, rasio ketergantungan masih sangat tinggi terhadap pemerintah Provinsi atau Kabupaten, rasio aktivitas masih belum berimbang antara rasio aktivitas belanja langsung dengan belanja tidak langsung, rasio pertumbuhan total PADes tahun 2016-2017 sangat rendah dan tahun 2017-2018 relatif sedang.

Lestari dkk (2020), melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. Menunjukkan hasil rasio efektifitas adalah efektif dan rasio efisiensi menunjukkan hasil yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Rohman dkk (2020) dan Lestari dkk (2020), dijadikan peneliti sebagai acuan dan rujukan dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2017-2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja pemerintah desa dengan judul penelitian **“Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020?
2. Seberapa Efektif Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020 Jika Dinilai Dengan Analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif kinerja keuangan pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020 jika dinilai dengan analisis SWOT.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan yang ingin diselesaikan, penelitian bermanfaat untuk:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang APBDes, baik secara teoritis maupun praktek yang diterapkan pada instansi pemerintah yang pada hal ini adalah Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, disamping itu juga sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
2. Bagi Masyarakat, yaitu : Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, dan juga sebagai bahan acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya.
3. Bagi Pemerintah Desa, Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mengevaluasi hasil kinerja dari Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari berdasarkan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga satuan kinerja Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.